



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KEUANGAN

Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran
BA.018



Balai Besar Pelatihan Pertanian
(BBPP Ketindan)
Semester II

2025

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



Jl. Ketindan No. 1 Lawang Malang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malang, Januari 2026

Kepala BBPP Ketindan,



Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si

NIP 196910232002122001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, Januari 2026

Kepala BBPP Ketindan,



Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si

NIP 196910232002122001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Ketindan Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp1.092.926.452,00 atau 102,07% dari anggaran sebesar Rp1.070.742.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.870.020.987,00 atau mencapai 99,93% dari alokasi anggaran sebesar Rp12.879.168.000,00.

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp35.392.859.845,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.016.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35.386.843.345,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp25.991.910,00 dan Rp35.366.867.935,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.057.533.452,00, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp14.940.737.369,00, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar -Rp13.883.203.917,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar -Rp32.880.718,00 dan Rp0,00 sehingga Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada Semester II Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar -Rp13.916.084.635,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp37.507.570.393,00 ditambah Defisit-LO sebesar -Rp13.916.084.635,00. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp11.777.094.535,00, penurunan ekuitas sebesar -Rp2.140.702.458,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.366.867.935,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
PENDAPATAN NEGARA					
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.1.1	1.070.742.000	1.092.926.452	102,07	1.586.068.361
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		1.070.742.000	1.092.926.452	102,07	1.586.068.361
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	6.324.653.000	6.317.398.144	99,89	6.018.134.791
Belanja Barang	B.2.2	6.342.939.000	6.341.293.093	99,97	12.194.357.454
Belanja Modal	B.2.3	211.576.000	211.329.750	99,88	122.838.000
JUMLAH BELANJA NEGARA		12.879.168.000	12.870.020.987	99,93	18.335.330.245

Malang, Januari 2026

Kepala BBPP Ketindan,



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.

NIP. 196910232002122001

II. NERACA

**KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
ASET	C.1		
ASET LANCAR	C.1.1		
Persediaan	C.1.1.1	6.016.500	8.508.900
JUMLAH ASET LANCAR		6.016.500	8.508.900
ASET TETAP	C.1.2		
Tanah	C.1.2.1	13.890.000.000	13.890.000.000
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	16.925.853.252	16.714.523.502
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	31.809.387.820	31.809.387.820
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.1.2.4	2.014.451.900	2.014.451.900
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.5	119.119.634	119.119.634
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	-29.371.969.261	-27.092.517.859
JUMLAH ASET TETAP		35.386.843.345	37.454.964.997
ASET LAINNYA	C.1.3		
Aset Lain-lain	C.1.3.1	0	1.803.593.851
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB	C.1.3.2	0	-1.747.493.707
JUMLAH ASET LAINNYA		0	56.100.144
JUMLAH ASET		35.392.859.845	37.519.574.041
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.1.1	11.343.910	11.462.648
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.2	14.648.000	541.000
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		25.991.910	12.003.648
JUMLAH KEWAJIBAN		25.991.910	12.003.648
EKUITAS	C.3		
Ekuitas	C.3.1	35.366.867.935	37.507.570.393
JUMLAH EKUITAS		35.366.867.935	37.507.570.393
JUMLAH EKUITAS		35.366.867.935	37.507.570.393
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		35.392.859.845	37.519.574.041

Malang, Januari 2026

Kepala BBPP Kertand, 

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.

NIP.196910232002122001

III. LAPORAN OPERASIONAL

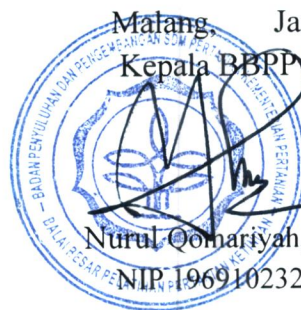
KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.057.533.452	1.561.380.361	-503.846.909	- 32,27
JUMLAH PENDAPATAN		1.057.533.452	1.561.380.361	-503.846.909	- 32,27
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	6.317.398.144,	6.012.670.255,	304.727.889	5,07
Beban Persediaan	D.3	92.679.000,	124.056.000,	-31.377.000	- 25,29
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.185.797.926,	5.166.117.189,	-980.319.263	- 18,98
Beban Pemeliharaan	D.5	1.399.852.069,	1.565.613.870,	-165.761.801	- 10,59
Beban Perjalanan Dinas	D.6	665.337.760,	5.091.041.220,	-4.425.703.460	- 86,93
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	237.211.800	-237.211.800	- 100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.279.672.470,	2.334.639.241,	-54.966.771	- 2,35
JUMLAH BEBAN		14.940.737.369	20.531.349.575	-5.590.612.206	- 27,23
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-13.883.203.917	-18.969.969.214	5.086.765.297	- 26,81
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		-54.166.718	5.000.000	-59.166.718	- 1.183,33
Pendapatan Pelepasan Aset	D9	0,	5.000.000	-5.000.000	- 100,00
Beban Pelepasan Aset	D10	54.166.718,	0	54.166.718	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.286.000	26.180.000	-4.894.000	- 18,69
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D11	21.286.000	26.180.000	-4.894.000	- 18,69
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-32.880.718	31.180.000	-64.060.718	- 205,45
SURPLUS/ (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-13.916.084.635	-18.938.789.214	5.022.704.579	- 26,52
POS LUAR BIASA		0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO		-13.916.084.635	-18.938.789.214	5.022.704.579	- 26,52

Malang, Januari 2026

Kepala BBPP Ketindan,



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.

NIP.196910232002122001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	37.507.570.393	39.449.439.323
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	-13.916.084.635	-18.938.789.214
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	- 1.712.358	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	- 1.712.358	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	11.777.094.535	16.996.920.284
Ditagihkan Ke Entitas Lain	E.4.1	12.870.020.987	18.335.330.245
Diterima Dari Entitas Lain	E.4.2	-1.092.926.452	-1.586.068.361
Transfer Masuk	E.4.3	0	247.658.400
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	-2.140.702.458	-1.941.868.930
EKUITAS AKHIR	E.6	35.366.867.935	37.507.570.393



Malang, Januari 2026
Kepala BBPP Ketindan,

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan adalah satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian yang didirikan untuk mendukung program-program pertanian Indonesia. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menetapkan visi jangka menengah 2020 – 2025, yaitu : “Menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik dan centre of excellent untuk mewujudkan SDM Pertanian yang profesional, mandiri dan berdaya saing”.

Lembaga pelatihan terpercaya dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga pelatihan yang dipercaya mampu mencetak alumni pelatihan/purnawidya, sehingga setelah mengikuti pelatihan di BBPP Ketindan akan meningkat kompetensinya. Hal tersebut sesuai dengan janji maklumat layanan BBPP Ketindan “Dijamin kompetensi anda meningkat.” Lembaga Pelatihan terbaik dimaksudkan bahwa BBPP Ketindan ingin menjadi lembaga/balai pelatihan terbaik diantara balai-balai lain baik tingkat nasional maupun internasional. Centre of excellent, maksudnya adalah bahwa BBPP ketindan kedepan ingin menjadi pusat layanan unggulan dibidang pelatihan pertanian. SDM pertanian yang profesional, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, ketrampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. SDM pertanian yang mandiri, adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggungjawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. SDM pertanian yang berdaya saing, adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan.

Guna mewujudkan visi-visi tersebut, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan 25 kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usahatani yang prima;
2. Mengembangkan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ;
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usaha tani;

7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Menciptakan inovasi-inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi dan berdaya saing;
9. Memantapkan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima.

Tujuan yang ingin dicapai BBPP Ketindan pada periode 2020 – 2025 sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan, adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator “persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya” dengan target 60% (tahun 2020) sampai dengan 90% (tahun 2024);
2. Peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, dengan indikator “tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan pertanian (skala likert)” dengan target 3,90 (tahun 2020) sampai dengan 3,94 (tahun 2024);
3. Peningkatan reformasi birokrasi BBPP Ketindan yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima, dengan indikator “nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BBPP Ketindan” dengan target 33,25 (tahun 2020) sampai dengan (34,25 (tahun 2024);
4. Pengelolaan anggaran BBPP Ketindan yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator “nilai kinerja anggaran BBPP Ketindan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 (aplikasi SMART DJA)”, dengan target 90,00 (tahun 2020) sampai dengan 90,80 (tahun 2024).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp1.092.926.452,00 atau 102,07% dari anggaran sebesar Rp1.070.742.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Semester II TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Semester II TA 2025

Uraian		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
425	Pendapatan PNBP Lainnya	1.070.742.000	1.092.926.452	102,07	1.586.068.361
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	441.092.000	422.525.452	95,79	362.294.361
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	629.650.000	649.115.000	103,09	1.197.594.000
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	21.286.000	0	26.180.000
Jumlah		1.070.742.000	1.092.926.452	102,07	1.586.068.361

Realisasi PNBP TA 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada **Lampiran B.1**.

B.1.1. PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 adalah sebesar Rp1.092.926.452,00 atau 102,07% dari anggaran pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp1.070.742.000,00. Realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp493.141.909,00, atau -31,09% dibandingkan TA 2024. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan PNBP Lainnya TA 2025.

Tabel B.1.1 Anggaran dan Realisasi PNBP Lainnya Semester I TA 2025

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	47.738.000	50.513.400	8.675.000,00	41.838.400,00
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	21.286.000	0	5.000.000	-5.000.000,00
3	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.972.000	21.972.000	10.807.361,00	11.164.639,00
4	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Pertanian sesuai dengan Tusi	350.096.000	350.040.052	337.812.000,00	12.228.052,00
5	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	629.650.000	631.650.000	1.180.170.000,00	-548.520.000,00
6	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Lainnya		17.465.000	17.424.000,00	41.000,00
7	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		21.286.000	0	21.286.000,00
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		0	26.180.000,00	-26.180.000,00
Jumlah		1.070.742.000,00	1.092.926.452,00	1.586.068.361,00	-493.141.909,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan pendapatan PNBP Lainnya TA 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp 422.525.452,00 terdiri atas:

- a. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp50.513.400,00 merupakan penerimaan yang berasal dari Perolehan hasil pertanian, diantaranya penjualan buah melon, jagung manis, sayur sawi dan olahan tanaman obat seperti manisan kencur, temu mangga dan jahe.
 - b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.972.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari sewa tanah, gedung dan bangunan oleh KPRI Batih untuk jangka waktu 3 tahun.
 - c. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi sebesar Rp350.040.052,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari sewa asrama, *guest house*, kelas, *sound systems*, LCD dan rumah milik negara.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar Rp649.115.000,00 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp631650.000,00 yang berasal dari penerimaan kerja sama Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian Ahli dan jasa pemagangan dan penelitian.
 - b. Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya sebesar Rp17.465.000,00 yang berasal dari jasa kunjungan wisata pertanian.
 3. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp21.286.000,00 yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu adalah setoran uang makan pegawai bulan Desember Tahun 2024.

Sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian/Lembaga, besaran penggunaan dana PNBP untuk Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebesar 86%.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja TA 2025 adalah sebesar Rp12.870.020.987,00 atau 99,93% dari anggaran belanja sebesar Rp12.879.168.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	6.324.653.000	6.317.398.144	99,89	6.018.134.791
Belanja Barang	6.342.939.000	6.341.293.093	99,97	12.194.357.454
Belanja Modal	211.576.000	211.329.750	99,88	122.838.000
Jumlah	12.879.168.000	12.870.020.987	99,93	18.335.330.245

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.789.426.000	2.787.707.410	99,94	8.167.990.284
Program Dukungan Manajemen	10.089.742.000	10.082.313.577	99,93	10.167.339.961
Jumlah	12.879.168.000	12.870.020.987	99,93	18.335.330.245,00

Laporan realisasi belanja berdasarkan akun disajikan pada **Lampiran B.2**. Realisasi belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp5.465.309.258,00 atau -29,81%, apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain berkurangnya alokasi anggaran pelatihan maupun perjalanan dinas dikarenakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

B.2.1. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.317.398.144,00 dan Rp6.018.134.791,00. Realisasi belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 299.263.353 atau 4,74% dibandingkan TA 2024.

Kenaikan tersebut terjadi karena adanya beberapa pegawai yang beralih dari jabatan fungsional umum menjadi fungsional widyaiswara, pegawai mengalami kenaikan pangkat mengalami kenaikan gaji berkala. Terdapat peralihan status pegawai PNP menjadi PPPK sebanyak 20 orang. Penambahan alokasi PPPK baru sebanyak 6 orang dan perpindahan 1 pegawai dari BRIN sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai yang bekerja di BBPP Ketindan sebanyak 101 orang dengan komposisi jumlah pegawai di BBPP Ketindan sebagai berikut:

1. Jumlah PNS sebanyak 68 orang,
2. Jumlah CPNS sebanyak 3 orang
3. Jumlah PPPK sebanyak 28 orang
4. Jumlah PPPK Paruh Waktu sebanyak 1 orang
5. Jumlah PNP sebanyak 1 orang

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 menurut klasifikasi.

Tabel B.2.1.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.868.509.000	5.866.167.597	99,96	5.787.045.878
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	456.144.000	451.230.547	98,92	120.651.913
Belanja Lembur	0	0	0,00	110.437.000
Jumlah	6.324.653.000	6.317.398.144	99,89	6.018.134.791

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.341.293.093,00 dan Rp12.194.357.454,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang TA 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel B.2.2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang	3,977,775,000	3,976,591,889	99.97	4,942,648,612
Belanja Barang Operasional	2,225,146,000	2,225,105,589	100.00	2,418,689,348.00
Belanja Barang Non Operasional	1,662,125,000	1,660,982,300	99.93	2,392,734,264.00
Belanja Barang Persediaan	90,504,000	90,504,000	100.00	131,225,000.00
Belanja Jasa	299,927,000	299,828,775	99.97	356,516,052
Belanja Jasa	299,927,000	299,828,775	99.97	356,516,052.00
Belanja Pemeliharaan	1,399,571,000	1,399,534,669	100.00	1,566,939,770
Belanja Pemeliharaan	1,399,571,000	1,399,534,669	100.00	1,566,939,770.00
Belanja Perjalanan Dinas	665,666,000	665,337,760	99.95	5,091,041,220
Belanja Perjalanan DN	665,666,000	665,337,760	99.95	5,091,041,220
Belanja Perjalanan Dinas	0	0	0.00	237,211,800
Belanja Barang Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0.00	237,211,800
Jumlah	6,342,939,000	6,341,293,093	99.97	12,194,357,454

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp128.457.900,00 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.2.2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2025 Berdasarkan Jenis yang menghasilkan barang persediaan

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	90,504,000.00	90,504,000.00	100.00	131,225,000.00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90,504,000.00	90,504,000.00	100.00	131,225,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,399,571,000.00	1,399,534,669.00	100.00	1,567,479,770.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	867,852,000.00	867,852,000.00	100.00	1,041,896,000.00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	37,956,000.00	37,953,900.00	99.99	26,937,400.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	493,763,000.00	493,728,769.00	99.99	498,646,370.00
Jumlah	1,490,075,000.00	1,490,038,669.00	100.00	1,698,704,770.00

Realisasi belanja barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp208.666.101,00 atau 14% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi efisiensi penggunaan anggaran dan juga tidak adanya alokasi anggaran Belanja Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda.

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp211.329.750,00 dan Rp122.838.000,00. Belanja Modal yang direalisasi di TA 2025 ini hanya Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Realisasi Belanja Modal TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp88.491.750,00 atau 72,04% dibandingkan TA 2024. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan belanja modal peralatan dan mesin TA 2025 lebih banyak dibandingkan TA 2024.

Tabel B.2.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	211,576,000.00	211,329,750.00	99.88	122,838,000.00
Jumlah	211,576,000.00	211,329,750.00	99.88	122,838,000.00

Belanja modal peralatan dan mesin pada tahun ini berupa mesin potong rumput, mixer, komputer, laptop, printer, webcam, headset, AC dan *Water Heater*.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp36.526.822.278,00 dan Rp37.519.574.041,00. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp992.751.763,00 atau -2,65%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1 Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	6.016.500,00	8.508.900,00
Aset Tetap	36.520.805,778,00	37.454.964,997,00
Aset Lainnya	-	56.100,144,00
Jumlah	36,526,822,278,00	37,519,574,041,00

C.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.016.500,00 dan Rp8.508.900,00. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.429.400,00 atau -29,29%, apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1 Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Persediaan	6.016.500,00	8.508.900,00
Jumlah	6,016,500,00	8,508,900,00

C.1.1.1 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.016.500,00 dan Rp8.508.900,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp2.492.400,00 atau -29,29% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.1.1 Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	4.994.000,00	7.169.000,00	(2.175.000,00)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	1.022.500,00	1.339.900,00	(317.400,00)
	Total	6,016,500,00	8,508,900,00	(2,492,400,00)

Rincian persediaan barang konsumsi dan bahan untuk pemeliharaan pada periode 31 Desember 2025 telah tercatat pada Berita Acara Stock Opname Persediaan.

C.1.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp35.386.843.345,00 dan Rp37.454.964.997,00. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.068.121.652,00 atau -5,52% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	30 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	13.890.000.000,00	13.890.000.000,00	-
2	Peralatan dan Mesin	16.925.853.252,00	16.714.523.502,00	211.329.750,00
3	Gedung dan Bangunan	31.809.387.820,00	31.809.387.820,00	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.014.451.900,00	2.014.451.900,00	-
5	Aset Tetap Lainnya	119.119.634,00	119.119.634,00	-
8	Akumulasi Penyusutan	(29.371.969.261,00)	(27.092.517.859,00)	(2.279.451.402,00)
	Jumlah	35.386.843.345,00	37.454.964.997,00	(2.068.121.652,00)

Saldo Aset Tanah senilai Rp13.890.000.000,00 telah dilakukan inventarisasi ulang dan seluruhnya telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP). Saldo Peralatan dan Mesin senilai Rp16.925.853.252,00 seluruhnya telah dilakukan Inventarisasi dan PSP senilai Rp16.837.251.252 belum PSP 88.602.000 (pngadaan 2025) Saldo Gedung Bangunan senilai Rp31.809.387.820,00 telah dilakukan inventarisasi ulang dan telah PSP senilai Rp31.815.828.448,00. Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.014.451.900,00 seluruhnya telah diinventarisasi dan PSP.

C.1.2.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.890.000.000,00 dan Rp13.890.000.000,00. Luas tanah 47.334 m² dan telah bersertifikat a.n Pemerintah RI cq Kementerian Pertanian. Tidak ada mutasi tanah pada periode ini

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp16.925.853.252,00 dan Rp16.714.523.502,00. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp211.329.750,00 atau 1,26% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai Perolehan
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	16.714.523.502,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	211.329.750,00
Transfer Masuk	0
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	0
Saldo per 31 Desember 2025	16.925.853.252,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	-12.164.594.458,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.761.258.794,00

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan Mesin di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.2.1 Rincian Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	30 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	16.925.853.252	16.714.523.502	211.329.750
Jumlah		16.925.853.252	16.714.523.502	211.329.750

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp31.809.387.820,00 dan Rp Rp31.809.387.820,00,00. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang gedung dan bangunan pada periode ini. Rincian saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan menurut Eselon I di Kementerian Pertanian disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.3 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Gedung dan Bangunan	31.809.387.820	31.809.387.820	0
Jumlah		31.809.387.820	31.809.387.820	0

Pada Tahun 2025, terdapat gedung dan bangunan seluas 78,6 M² yang disewakan kepada KPRI Batih dengan nilai sewa sebesar Rp21.972.000,00 untuk kurun waktu 3 tahun. Dokumen pendukung tersebut disajikan pada Lampiran C.2.3.

C.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.014.451.900,00 dan Rp2.014.451.900,00. Tidak ada mutasi tambah ataupun kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode ini.

Rincian saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.4 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	719.200.000	719.200.000	0
2	Irigasi	509.140.500	509.140.500	0
3	Jaringan	786.111.400	786.111.400	0
Jumlah		2.014.451.900	2.014.451.900	0

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp119.119.634,00 dan Rp119.119.634,00. Tidak ada mutasi tambah ataupun kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada periode ini.

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya menurut Eselon I di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.5 Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya	119.119.634	119.119.634	0
Jumlah		119.119.634	119.119.634	0

Saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp119.119.634,00 berupa monografi, atlas, dan market/miniaturnya seluruhnya telah dilakukan inventarisasi dan PSP.

C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp28.238.006.828,00 dan Rp27.092.517.859,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.145.488.969,00 atau 4,23% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.6 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	16.061.844.644	15.490.136.663	571.707.981
2	Gedung dan Bangunan	12.164.594.458	10.562.278.198	1.602.316.260
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.145.530.159	1.040.102.998	105.427.161
Jumlah		29.371.969.261	27.092.517.859	2.279.451.402

Jika dibandingkan, tidak terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.2.6.1 Perbandingan Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan dengan Beban Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Jenis Aset Tetap	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	571.707.981	571.707.981	0
2	Gedung dan Bangunan	1.602.316.260	1.602.316.260	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.427.161	105.427.161	0
	Jumlah	2.279.451.402	2.279.451.402	0

C.1.3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp56.100.144,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp56.100.144,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3 Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lain-lain	0	1.803.593.851	-1.803.593.851
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain/Amortisasi	0	-1.747.493.707	1.747.493.707
	Jumlah	0	56.100.144	-56.100.144

C.1.3.1 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp1.803.593.851,00. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 mengalami penurunan 100% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024. Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3.1 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Klasifikasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	0	1.749.262.153	-1.749.262.154
2	Aset Tetap Lainnya	0	54.331.608	-54.331.609
	Jumlah	0	1.803.593.761	-1.803.593.761

Nilai Aset Lain-lain pada periode ini senilai Rp0,00 dikarenakan aset tersebut telah dihapuskan, dimana sebelumnya terdapat 3 usulan (1. Usulan penghapusan karena Rusak Berat ke KPKNL dengan nilai perolehan 117.923.592, dan sudah terbit Risalah Lelang No.1198/10.3/2024-01 tanggal 3 Desember 2024; 2. Usulan penghapusan karena Rusak Berat, No:B-118/PL.320/I.14.1/09/2024 tanggal 17 Desember 2024 senilai 1.348.793.941; dan 3. Usulan penghapusan karena sebab-sebab lain No: B-116/PL.320/I.14.1/09/2024 senilai 341.048.318). Keseluruhan usulan tersebut telah terbit SK penghapusan.

C.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.747.714.775,00 dan Rp1.747.493.707,00. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar -Rp1.747.493.707,00 atau -100% apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB per 31 Desember dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.1.3.2 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain dan Amortisasi ATB

No	Klasifikasi	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	0	1.747.493.707	-1.747.493.707
	Jumlah	0	1.747.493.707	-1.747.493.707

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp509.588.034,00 dan Rp12.003.648,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp497.584.386,00 atau 4.145,28% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp25.991.910,00 dan Rp12.003.648,00. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp13.988.262,00 atau 1126,53% apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024.

Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1 Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	11.343.910.00	11.462.648.00	(118.738.00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	14.648.000.00	541.000.00	14.107.000.00
	Jumlah	25.991.910.00	12.003.648.00	13.988.262.00

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.343.910,00 dan Rp11.462.648,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp118.738,00 atau -1,04 % apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.1 Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Jasa	11,343,910.00	11,462,648.00	(118,738.00)
Total			11,343,910.00	11,462,648.00	(118,738.00)

1. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp11.343.910,00 terdiri dari:

- Belanja jasa atas listrik bulan Desember 2025 sebesar Rp11.271.296,00 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2026.
- Belanja jasa atas telepon bulan Desember 2025 sebesar Rp72.614,00 yang dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2026

C.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.648.000,00 dan Rp541.000,00. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp14.107.000,00 atau 2.607,58% apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel C.2.1.2 Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis PNB	Eselon I	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	14,648,000.00	541,000.00	14,107,000.00
Total			14,648,000.00	541,000.00	14,107,000.00

C.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp35.366.867.935,00 dan Rp37.507.570.93,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp2.140.702.458,00 atau -5,71% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**KEGIATAN OPERASIONAL**

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah, kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran.

Rincian Kegiatan Operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.1 Kegiatan Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	1,057,533,452	1,561,380,361
Beban Operasional	14,940,737,369	20,531,349,575
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(13,883,203,917)	(18,969,969,214)

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional, seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset.

Nilai Pendapatan Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.057.533.452,00 dan Rp1.561.380.361,00. Pendapatan Operasional Tahun 2025 berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak, seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan pemerintah, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.057.533.452,00 dan Rp1.561.380.361,00. Nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp503.846.909,00 atau -32,27% apabila dibandingkan dengan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya TA 2025 di LRA disajikan sebesar Rp1.092.926.452,00 sedangkan nilai Pendapatan PNBPN Lainnya Tahun 2024 di LO disajikan sebesar Rp1.057.533.452,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp35.393.000,00. Selisih tersebut berasal dari setoran uang makan pegawai bulan Desember 2024 sebesar Rp21.286.000,00 dengan pengakuan pendapatan sewa diterima di muka atas gedung dan bangunan oleh KPRI Batih sebesar Rp14.107.000,00 sebagaimana tersaji pada Tabel D.1.1.

Tabel D.1.1 Perbandingan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	50,513,400	50,513,400	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21,972,000	7,865,000	14,107,000
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	350,040,052	350,040,052	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	631,650,000	631,650,000	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	17,465,000	17,465,000	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21,286,000	-	21,286,000
Jumlah	1,092,926,452	1,057,533,452	35,393,000

Terdapat selisih pembukuan antara Bendahara Penerimaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2025 sebesar Rp1.086.671,00 dikarenakan sewa rumah dinas yang dibayarkan para pegawai dilakukan melalui mekanisme potongan SPM No. 00293A Tanggal 11 November 2025.

BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang, barang, atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program, atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.940.737.369,00 dan Rp20.531.349.575,00. Nilai Beban Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp5.590.612.206,00 atau -27,23% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai, baik pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maupun tenaga honorer, sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp6.317.398.144,00 dan Rp6.012.670.255,00. Nilai Beban Pegawai Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp304.727.889,00 atau 5,07% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.1 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.866.167.597	5.889.368.342	- 23.200.745
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	451.230.547	123.301.913	327.928.634
Jumlah	6.317.398.144	6.012.670.255	304.727.889

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.2.2 Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.866.167.597	5.866.167.597	0
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	451.230.547	451.230.547	0
Jumlah	6.317.398.144	6.317.398.144	0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar R92.679.000,00 dan Rp124.056.000,00. Nilai Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp31.377.000,00 atau -25,29% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.1 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	92.679.000	124.056.000	-31.377.000
Jumlah	92.679.000	124.056.000	-31.377.000

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.3.2 Perbandingan Belanja/Beban Persediaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang Persediaan	90.504.000	92.679.000	-2.175.000
Jumlah	90.504.000	92.679.000	-2.175.000

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp2.175.000,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	7.169.000
Tercatat sebagai Persediaan	-4.994.000
Jumlah	2.175.000

Selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp2.175.000,00 berasal dari saldo awal persediaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp7.169.000,00 dengan saldo akhir barang persediaan sebesar Rp4.994.000,00. Saldo akhir barang konsumsi tersebut berupa alat tulis kantor (buku tulis, bopoint, stopmap, kertas HVS, dan sebagainya) dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan terlampir.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.089.573.727,00 dan Rp1.924.752.137,00. Nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp164.821.950,00 atau 8,56% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.1 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.225.105.589	2.433.013.941	-207.908.352
Beban Barang Non Operasional	1.660.982.300	2.392.734.264	-731.751.964
Beban Jasa			
Beban Jasa	299.710.037	340.368.984	-40.658.947
Jumlah	4.185.797.926	6.166.117.189	(980.319.263)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.4.2 Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Operasional	2.225.105.589	2.225.105.589	0
Beban Barang Non Operasional	1.660.982.300	1.660.982.300	0
Beban Jasa			
Beban Jasa	299.828.775	299.710.037	118.738
Jumlah	4.185.916.664	4.185.797.926	118.738

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO sebesar Rp118.738,00. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Jurnal balik beban tahun sebelumnya	(11.462.648)
Kenaikan Beban Barang yang masih harus dibayar (SPP belum SP2D)	11.343.910
Jumlah	(118.738)

Jurnal balik beban tahun sebelumnya sebesar Rp11.462.648,00 berasal dari pembayaran beban barang dan jasa tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025. Beban barang dan jasa tersebut yaitu beban listrik bulan Desember 2024 sebesar Rp11.366.554,00 yang telah dibayarkan dengan SPM No.00005A tanggal 9 Januari 2025, beban telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp96.094,00 yang telah dibayarkan dengan SPM No. 00004A tanggal 9 Januari 2025. Kenaikan Beban Barang yang masih harus dibayar (SPP belum SP2D) adalah pencatatan beban barang dan jasa di bulan Desember 2025 yang dibayarkan bulan Januari 2026 berupa listrik sebesar Rp11.271.296.000,00 dan telepon sebesar 72.614,00.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau asset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau

memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset, tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.399.852.069,00 dan Rp1.565.613.870,00. Nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp165.761.801,00 atau -10,59% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024.

Tabel D.5.1 Beban Barang Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	867.852.000,	1.041.896.000,00	-174.044.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	493.728.769,	498.646.370,00	-4.917.601
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	38.271.300,	25.071.500,00	13.199.800
Jumlah	1.399.852.069,	1.565.613.870	-165.761.801

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp1.399.543.669,00, nilai Beban Pemeliharaan di LO lebih besar sebesar Rp317.400,00. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.5.2 Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan Tahun 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	867.852.000	867.852.000,	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	493728769	493.728.769,	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang	37953900	38.271.300,	-317.400
Jumlah	1.399.534.669	1.399.852.069	-317.400

Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Saldo Awal	1.339.900
Tercatat sebagai Persediaan	-1.022.500
Jumlah	317.400

Selisih realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA dengan di LO berasal dari saldo awal persediaan pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.339.900,00 dengan saldo akhir barang persediaan sebesar Rp1.022.500,00. Saldo akhir bahan untuk pemeliharaan tersebut berupa sikat kamar mandi, keset, ember, cikrak dan sebagainya dengan Berita Acara Stock Opname Persediaan terlampir

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas, yang mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp665.337.760,00 dan Rp5.091.041.220,00. Nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp812.812.153,00 atau -86,93% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp284.911.966,00, nilai Beban Perjalanan Dinas di LO adalah sama. Selisih tersebut adalah:

Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	381.638.427	381.638.427	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	277.189.333	277.189.333	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.510.000,00	6.510.000,00	0
Jumlah	665.337.760	665.337.760	0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp237.211.800,00. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp237.211.800,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dikarenakan tidak ada pemberian bantuan tersebut. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.7.1 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	0	237.211.800	-237.211.800
Jumlah	0	237.211.801	-237.211.801

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.279.672.470,00 dan Rp2.334.639.241,00. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp54.966.771,00 atau -2,35% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.8.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	16.061.844.644	15.490.136.663,00	571.707.981
		Gedung dan Bangunan	12.164.594.458	10.562.278.198,00	1.602.316.260
		Jalan Irigasi dan Jaringan	1.145.530.159	1.040.102.998	105.427.161
		Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	29.371.969.261	27.092.517.859	2.279.451.402	
2	Aset Lain-Lain	Peralatan & Mesin	0	1.747.493.707,00	-1.747.493.707
		Aset Tak Berwujud	0	0	0
	Jumlah	0	1.747.493.707	-1.747.493.707	

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar –Rp13.883.203.917,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.086.765.297,00 atau 26,81% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar –Rp18.969.969.214,00.

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari. Rincian Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.9 Kegiatan Non Operasional Kementerian Pertanian Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-54.166.718	5.000.000
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	21.286.000	26.180.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-32.880.718	31.180.000

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar –Rp32.880.718,00 dan Rp31.180.000,00. Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar –Rp64.060.718,00 atau -205,45% apabila dibandingkan dengan Nilai Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.

D.9 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp5.000.000,00. Nilai Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp5.000.000,00 atau -100% apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024.

D.10 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp54.166.718,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp54.166.718,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024

D.11 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp21.286.000,00 dan Rp26.180.000,00. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp4.894.000,00 atau -18,69% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel D.11.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025

No.	Uraian		2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	21.286.000	0	21.286.000
		Belanja Pegawai	0	26.180.000	-26.180.000
Jumlah			21.286.000	26.180.000	-4.894.000

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengalami surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar 21.286.000,00. Nilai surplus tersebut mengalami penurunan sebesar -Rp4.894.000,00 atau -18,69% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp26.180.000,00.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (unusual) dan jarang terjadi (infrequent), serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

Pendapatan Luar Biasa

Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Pendapatan Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

Beban Luar Biasa

Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai Beban Luar Biasa Tahun 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

SURPLUS/DEFISIT - LO

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindna mengalami Defisit LO sebesar -Rp13.916.084.635,00. Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.022.704.579,00 atau 26,52% apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar -Rp18.938.789.214,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp37.507.570.393,00 dan Rp39.449.439.323,00. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.941.868.930,00 atau 4,92% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar –Rp13.916.084.635,00 dan Rp18.938.789.214,00. Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.022.704.579,00 atau -26,52% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar – Rp1.712.358,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar –Rp1.712.358,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi berasal dari penghapusan atas aset lain-lain yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan berupa atlas dan alat pemanas jaket.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.870.020.987,00 dan Rp18.335.330.245,00. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar –Rp5.465.309.258,00 atau - 29,81% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN).

Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar –Rp1.092.926.452,00 dan - Rp1.586.068.361,00. Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir

sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp493.141.909,00 atau -31,09% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.4.3 Transfer Masuk

Transfer Masuk adalah penerimaan dana, barang, atau asset dari entitas lain. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp247.658.400,00. Nilai transfer Masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp247.658.400,00 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

E.3 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada Tahun 2025, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengalami penurunan ekuitas sebesar -Rp2.140.702.458,00. Nilai penurunan tersebut lebih tinggi sebesar Rp198.833.528,00 atau 10,24% apabila dibandingkan dengan penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp1.941.868.930,00.

E.4 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp35.366.867.935,00 dan Rp37.507.570.393,00. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar -Rp2.140.702.458,00 atau -5,71% apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. BMN YANG DISEWAKAN KEPADA PIHAK KETIGA

Terdapat BMN yang disewakan kepada KPRI Batih yang dibayarkan pada Tanggal 3 Januari 2025 untuk masa 3 Tahun senilai Rp21.972.000,00.

F.2. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET

Terdapat aset tetap berupa tanah sebanyak 1 NUP senilai Rp13.890.000.000,00 telah PSP dan tersertifikasi a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertanian dan aset tersebut telah PSP. Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp16.925.853.252,00 dengan kondisi tidak ada yang rusak berat. Aset tersebut telah PSP senilai Rp16.837.251.251,00 dan belum PSP senilai Rp88.602.000,00. Satker telah mengajukan PSP senilai Rp 88.602.000,00 dengan no.surat B-92/PL.330/I.15.1/01/2026 tanggal 15 Januari 2025. Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin senilai Rp16.925.853.252,00 dengan kondisi tidak ada yang rusak berat. Aset tersebut telah PSP senilai Rp16.837.251.251,00 dan belum PSP senilai Rp88.602.000,00. Satker telah mengajukan PSP senilai Rp 88.602.000,00 dengan no.surat B-92/PL.330/I.15.1/01/2026 tanggal 15 Januari 2025. Terdapat aset tetap berupa JIJ senilai Rp2.014.451.900,00 dengan kondisi tidak ada kondisi yang rusak berat. Aset tersebut seluruhnya telah PSP senilai Rp2.014.451.900,00. Terdapat aset tetap lainnya senilai Rp119.119.634,00 dengan kondisi tidak ada rusak berat. Aset tersebut seluruhnya telah dilakukan PSP.

F.3. PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT PERFUNGSI

Fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan Kode 04.03 merupakan fungsi ekonomi dengan subfungsi adalah Pertanian, Kehutan, Perikanan dan Kelautan. Fungsi ini memiliki 2 Program yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Kode DL dan Program Dukungan Manajemen dengan Kode WA. Capaian output untuk program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi memiliki kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian dengan kode 1810 memiliki tiga Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagai berikut:
 - a. Koordinasi dengan Kode AEA, kode Rincian Output (RO) 001 dengan uraian Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan. Pagu RO ini sebesar Rp550.000.000,00 dan sudah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,95% dari pagu yaitu Rp549.747.480,00. Target yang dilayani sebanyak 1 kegiatan dan sudah terealisasi 1 kegiatan dengan progres capaian output sebesar 100%.
 - b. Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan Kode CAG, Kode Rincian Outputnya adalah 001 dengan uraian Sarana Pelatihan Pertanian. Pagu RO ini sebesar 356.240.000,00 dan telah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,92% dari pagu yaitu Rp355.938.750,00. Target yang dilayani sebanyak 1 unit dan sudah terealisasi 1 unit dengan progres capaian output sebesar 100%.
 - c. Sertifikasi Profesi dan SDM dengan Kode PDI, Kode Rincian Outputnya adalah U01 dengan uraian Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian. Pagu RO ini sebesar 276.748.000,00 dan telah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,72% dari pagu yaitu Rp275.964.702,00. Target yang dilayani sebanyak 11 orang dan sudah terealisasi 11 orang dengan progres capaian output sebesar 100%.
 - d. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan yang memiliki dua Rincian Output. RO Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur dengan Kode 001 memiliki pagu sebesar Rp423.301.000,00 dan telah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,95% dari pagu yaitu Rp423.095.411.000,00. Target yang dilayani sebanyak 66 orang dan sudah terealisasi 66 orang dengan progres capaian output sebesar 100%. RO Pelatihan

Vokasi Pertanian bagi Non Aparatur dengan Kode 002 memiliki pagu sebesar Rp1.183.137.000,00 dan telah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,99% dari pagu yaitu Rp1.182.961.067,00. Target yang dilayani sebanyak 4.245 orang dan sudah terealisasi 4.245 orang dengan progres capaian output sebesar 100%.

2. Program Dukungan Manajemen memiliki kegiatan Penguatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dengan kode 1813 memiliki satu Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagai berikut:
 - a. Layanan Perkantoran dengan Kode EBA, Kode Rincian Outputnya adalah 994 dengan uraian Layanan Perkantoran. Pagu RO ini sebesar Rp10.089.742.000,00 dan telah terealisasi per 31 Desember 2025 sebesar 99,94% dari pagu yaitu Rp10.084.164.002,00. Target yang dilayani sebanyak 1 layanan dan sudah terealisasi 1 layanan dengan progres capaian output sebesar 100%.

F.4. JURNAL PENYESUAIAN

Terdapat jurnal penyesuaian khusus pada bulan Januari 2025 yang merupakan jurnal pembalik atas jurnal penyesuaian yang dilakukan pada periode 31 Desember 2024 yaitu:

1. Pendapatan Sewa Diterima Di Muka atas sewa gedung dan bangunan oleh KPRI Batih sebesar Rp541.000,00.
2. Beban Listrik Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp11.366.554,00
3. Langganan Telepon Bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp 96.094,00.

Terdapat jurnal penyesuaian pada bulan Desember 2025 yaitu sebagai berikut:

4. Pendapatan Sewa Diterima Di Muka atas sewa gedung dan bangunan oleh KPRI Batih sebesar Rp14.648.000,00.
5. Beban Listrik Bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp11.271.296,00
6. Langganan Telepon Bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026 senilai Rp72.614,00.

F.5 KRONOLOGI REVISI ANGGARAN

0. DIPA AWAL TAHUN 2025 Rp. 10.713.896.000,- (2 DESEMBER 2024)

1. KRONOLOGIS REVISI DIPA I ANGGARAN TAHUN 2025 (3 Januari 2025)

Pembukaan blokir anggaran kecuali akun anggaran perjalanan dinas.

No	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen	Pagu
A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	969.677.000
	• Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	550.000.000
	• Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	267.638.000
	• Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	152.039.000
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	9.744.219.000
TOTAL KESELURUHAN		10.713.896.000

2. KRONOLOGIS REVISI DIPA II ANGGARAN TAHUN 2025(19 Pebruari 2025)

Adanya penambahan target dan anggaran pada output/KRO Pelatihan Bidang Pertanian sebesar Rp. 1.355.791.000,- dan Perikanan dan Efisiensi Anggaran dimana alokasi semua anggaran perjalanan masih terblokir 50%, sehingga Pagu Anggaran BBPP Ketindan menjadi Rp. 12.069.687.000,-

No	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Blokir	Sisa Blokir
A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI			
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	2.325.468.000	267.323.000	2.058.145.000
	• Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	550.000.000	158.710.000	391.290.000
	• Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	267.638.000	-	267.638.000
	• Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.507.830.000	108.613.000	1.399.217.000
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		-	
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	9.744.219.000	-	9.744.219.000
	TOTAL KESELURUHAN	12.069.687.000	267.323.000	11.802.364.000

3. KRONOLOGIS REVISI DIPA III ANGGARAN TAHUN 2025 (25 MARET 2025)

Revisi DIPA dalam rangka pembukaan blokir anggaran perjalanan dan lainnya

No	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen	Perjalanan (524) yang dibuka blokir	Selain Perjalanan yang dibuka blokir
A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI		
	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	288.175.000	56.612.000
	• Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	171.089.000	
	• Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	117.086.000	56.612.000
B	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya		370.029.000
	TOTAL	288.175.000	426.641.000
	TOTAL BLOKIR	714.816.000	

Penggunaan Anggaran BBPP Ketindan dalam Revisi III yg dibuka blokir

KOD E	KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH
051	KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA DAN EVALUASI		
A	Jejaring Kerjasama	10.290.000	-
B	Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran	17.160.000	-
C	Pengawasan dan Pendampingan Program Kementan	18.961.000	171.089.000
D	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	5.640.000	-
E	Sistem Manajemen Mutu	2.500.000	-
F	Evaluasi Pasca Pelatihan	13.800.000	-
G	Sistem Pengendalian Intern (SPI)	8.171.000	-
052	KOORDINASI PENYELENGGARAAN, KELEMBAGAANDAN KETENAGAAN		
A	Administrasi Kegiatan	39.675.000	-
B	Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi	7.632.000	-
C	Pembinaan Pegawai	10.316.000	-
D	Peningkatan Profesionalisme Petugas	6.818.000	-
F	Peningkatan Profesionalisme Tertentu	7.492.000	-
G	Inkubator Agribisnis	12.634.000	-

	TOTAL	171.089.000	171.089.000
--	--------------	--------------------	--------------------

	TOTAL	171.089.000	171.089.000
--	--------------	--------------------	--------------------

4. **KRONOLOGIS REVISI DIPA IV ANGGARAN TAHUN 2025 (23 April 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA, penyelesaian gaji ke 13 minus dan pengalokasian Layanan Dukungan Pelatihan Aparatur sebesar Rp. 132.854.000,- yang berasal dari optimalisasi TOT Alsintan.
5. **KRONOLOGIS REVISI DIPA V ANGGARAN TAHUN 2025 (11 Juli 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA dan penyelesaian gaji PPPK tahap I yang diambilkan dari eksisting gaji PNS
5. **KRONOLOGIS REVISI DIPA VI ANGGARAN TAHUN 2025 (8 September 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penambahan target penggunaan PNBP dengan menambahkan KRO Sertifikasi Profesi dan SDM sebesar Rp. 159.100.00,- sebanyak 2 angkatan 65 orang yang diperuntukan untuk Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mimika.
6. **KRONOLOGIS REVISI DIPA VII ANGGARAN TAHUN 2025 (19 September 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penambahan gaji untuk CPNS dan PPPK Tahap 1 sebesar Rp. 240.506.000,- dan pemindahan honor Satpan dan Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 81.280.000,- ke belanja gaji (001).
7. **KRONOLOGIS REVISI DIPA VIII ANGGARAN TAHUN 2025 (14 Oktober 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penyesuaian rencana penarikan pada halaman III DIPA dan optimalisasi sisa kegiatan.
8. **KRONOLOGIS REVISI DIPA IX ANGGARAN TAHUN 2025 (28 Nopember 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penambahan gaji untuk PNS, CPNS dan PPPK Tahap 2 sebesar Rp. 212.477.000,- dan pemindahan honor Satpam dan Pengemudi serta Honor Kebersihan dan Pramubakti sebesar Rp. 107.460.000,- ke belanja gaji (001).
9. **KRONOLOGIS REVISI DIPA X ANGGARAN TAHUN 2025 (8 Desember 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka penambahan target penggunaan PNBP yaitu
 - Pelatihan Agribisnis dan Urban Farming (Manokwari) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 107.070.000,-
 - Sertifikasi Fasilitator Organik sebanyak 15 orang sebesar Rp. 42.054.000,-
 - Sertifikasi Manajemen Agribisnis sebanyak 15 orang sebesar Rp. 42.054.000,-
 - Pelatihan Metodologi Penyuluh Pertanian bagi P4S (Kab. Bojonegoro) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 40.635.000,-
 - Sertifikasi Penyuluh Pertanian (Kab. Bojonegoro) sebanyak 15 orang sebesar Rp. 33.540.000,-
 - Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelatihan (Water heater dan AC) sebesar Rp. 88.602.000,-
10. **KRONOLOGIS REVISI DIPA XI ANGGARAN TAHUN 2025 (11 Desember 2025)**
 Revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran data POK tahun 2025 dan optimalisasi sisa kegiatan.